

Peran APSARA Authority dalam Kebijakan Pengelolaan Pariwisata Budaya di Angkor Wat, Kamboja: Upaya Perlindungan Situs UNESCO dari Overtourism

Alya Nabila Poundra ^{*1}

Firhan Tri Yunandra ²

Dahayu Pramudita Maritza ³

Reyza Julianne Wardhanny ⁴

Prisca Kiki Wulandari ⁵

^{1,2,3,4} Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya

⁵ Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya

*e-mail: alyanabila07@student.ub.ac.id¹, firhantri@student.ub.ac.id², maritzaa@student.ub.ac.id³, reyzajulianne@student.ub.ac.id⁴, priscakiki@ub.ac.id⁵

Abstrak

Artikel ini menganalisis efektivitas kebijakan APSARA Authority dalam mengelola kawasan Angkor Wat sebagai situs warisan budaya dunia yang menghadapi tekanan overtourism. Melalui studi literatur terhadap dokumen resmi APSARA, laporan UNESCO, serta kajian akademik mengenai pariwisata budaya dan konservasi, penelitian ini menilai bagaimana kebijakan zonasi, pengendalian wisatawan, dan konservasi arkeologi diterapkan untuk menjaga keberlanjutan situs. Temuan menunjukkan bahwa APSARA berhasil memperkuat perlindungan warisan melalui Zoning and Environmental Management Plan, pembangunan infrastruktur ramah lingkungan, dan kolaborasi internasional dalam konservasi. Namun, tantangan signifikan tetap muncul akibat lonjakan wisatawan dan ketergantungan finansial pada donor asing. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan jangka panjang Angkor bergantung pada adaptasi kebijakan, peningkatan kapasitas lokal, dan integrasi prinsip pariwisata budaya berkelanjutan dalam seluruh proses pengelolaan.

Kata Kunci: Angkor Wat, APSARA Authority, overtourism, pariwisata, pariwisata budaya

Abstract

This article analyzes the effectiveness of APSARA Authority policies in managing the Angkor Wat area as a world cultural heritage site facing the pressures of overtourism. Through a literature review of official APSARA documents, UNESCO reports, and academic studies on cultural tourism and conservation, this study assesses how zoning, tourist control, and archaeological conservation policies are implemented to maintain the site's sustainability. Findings show that APSARA has succeeded in strengthening heritage protection through its Zoning and Environmental Management Plan, the development of environmentally friendly infrastructure, and international collaboration in conservation. However, significant challenges remain due to the surge in tourists and financial dependence on foreign donors. This study emphasizes that the long-term success of Angkor depends on policy adaptation, increased local capacity, and the integration of sustainable cultural tourism principles into the entire management process.

Keywords: Angkor Wat, APSARA Authority, cultural tourism, overtourism, tourism

PENDAHULUAN

Pariwisata adalah suatu fenomena sosial-ekonomi dan budaya yang melibatkan pergerakan orang ke tempat-tempat di luar lingkungan tempat tinggal biasanya, baik untuk tujuan rekreasi, budaya, belajar, atau bisnis, dan sifatnya yang sementara. United Nation World Tourism Organization menyebutkan bahwa wisatawan adalah mereka yang tinggal di luar lingkungan biasanya yang tidak lebih dari satu tahun, dan pariwisata mencakup semua aktivitas dan layanan pendukung perjalanan tersebut. Pariwisata budaya merujuk pada kunjungan ke situs-situs warisan budaya, bangunan, monumen, tradisi, dan praktik budaya lokal, di mana interaksi antara pengunjung dan komunitas lokal serta pelestarian warisan menjadi inti dari pengalaman dan pengelolaan.

Kamboja sebagai negara dengan warisan budaya yang kaya, terutama situs Angkor, memiliki sejarah panjang akan konflik, pemulihan budaya, dan transformasi ekonomi lewat

pariwisata. Sejak rezim Khmer Merah dan periode konflik, pemerintah Kamboja telah menempatkan pelestarian budaya dan warisan sebagai prioritas dalam pembangunan kembali (Kiernan, 2010). Pendaftaran Angkor sebagai UNESCO's World Heritage Sites pada 1992 membawa perhatian internasional dan sumber daya baru untuk konservasi, sekaligus membuka peluang besar untuk pengembangan pariwisata yang dapat menggerakkan ekonomi daerah Siem Reap dan Kamboja. Angkor Wat, sebagai salah satu ikon budaya terbesar di Asia Tenggara dan destinasi utama bagi pariwisata budaya, rata-rata menarik 2,6 juta wisatawan setiap tahunnya (Vanyuth, 2024). Angka ini merupakan jumlah sekitar 470.000 wisatawan domestik dan sisanya merupakan wisatawan asing. Ada juga laporan bahwa sejak tahun 2000, Angkor telah dikunjungi sekitar 28 juta wisatawan internasional. (Myanmar Inquirer, 2025)

Namun demikian, permasalahan utama mulai muncul. Fenomena overtourism menjadi penyebab beberapa dampak negatif di Angkor. *Overtourism* diartikan sebagai kelebihan kunjungan wisatawan yang melebihi kapasitas fisik, ekologis, budaya, atau sosial-ekonomi suatu destinasi. Konsep ini berawal dari teori *carrying capacity* yang dijelaskan oleh Butler (1999) yaitu batas kemampuan suatu destinasi untuk menerima aktivitas wisata tanpa mengorbankan sumber daya alam dan sosial-budaya yang menopangnya. Dalam pandangan Butler, pariwisata yang berkelanjutan hanya dapat tercapai apabila setiap destinasi memahami dan mengatur jumlah kunjungan sesuai dengan kapasitas daya dukungnya, baik secara fisik, ekologis, sosial, maupun psikologis.

Secara fisik, batu-batu kuil mengalami erosi, degradasi material seperti pasir batu dan relief karena paparan cuaca dan gesekan pengunjung, serta kerusakan struktural lainnya (André et al., 2011). Penelitian oleh Uchidat et al. (2000) menunjukkan bahwa material batu pasir di monumen Angkor terdegradasi karena kelembapan, cuaca kimia, biodeteriorasi, dan banyak faktor lingkungan lainnya yang diperparah oleh kondisi paparan. Di sisi sosial-ekonomi dan budaya, masyarakat lokal menghadapi tekanan, seperti ketimpangan pendapatan karena sebagian besar manfaat ekonomi lebih banyak dinikmati aktor besar, bukan masyarakat sekitar (Mao et al., 2013; Hor, 2021).

Dalam pengembangan pariwisata, kebijakan yang baik tidak hanya menitikberatkan pada peningkatan jumlah wisatawan, tetapi juga pada upaya menciptakan manfaat ekonomi, sosial, dan budaya yang berkelanjutan. Damanik (2021) menyebutkan bahwa pengembangan pariwisata yang ideal harus memperhatikan tiga dimensi utama, yaitu *economic viability*, *sociocultural authenticity*, dan *environmental integrity*. Prinsip-prinsip tersebut menegaskan bahwa pariwisata seharusnya berperan sebagai instrumen pembangunan yang inklusif dan adaptif terhadap karakter lokal. Sejalan dengan hal tersebut, Prasiasa (2013) menekankan pentingnya pendekatan *Community-Based Tourism* (CBT) yang menempatkan masyarakat lokal sebagai aktor utama dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi wisata di wilayahnya.

Prinsip kebijakan pariwisata menekankan pada efisiensi ekonomi, pelestarian budaya, dan partisipasi masyarakat sebagai dasar pengelolaan yang berkelanjutan. Dari sisi efisiensi ekonomi, kebijakan pariwisata harus diarahkan agar kegiatan wisata dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi kesejahteraan rakyat serta memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut Dewa G. Rudy, pariwisata merupakan katalisator pembangunan karena mampu mendorong berbagai sektor lain seperti pertanian, industri kreatif, dan jasa transportasi sehingga dapat memperluas lapangan pekerjaan dan perputaran ekonomi daerah (Rudy & Mayasari, 2019:74). Maka dari itu, kebijakan pariwisata harus menyeimbangkan antara pencapaian keuntungan ekonomi dan keberlanjutan sumber daya. Di sisi lain, pelestarian budaya menjadi aspek penting dalam menjaga keaslian dan identitas lokal agar tidak tereduksi oleh orientasi pasar. Partisipasi masyarakat juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, yang memberikan hak dan prioritas bagi masyarakat lokal sebagai pelaku utama kegiatan pariwisata.

Pariwisata budaya pada dasarnya mengintegrasikan pelestarian warisan budaya dengan kebutuhan ekonomi melalui kegiatan wisata. Timothy (2014) menekankan bahwa pariwisata budaya telah berevolusi menjadi pengalaman yang menonjolkan interaksi, identitas, dan nilai simbolis masyarakat setempat. Namun, Graham, Ashworth, dan Tunbridge (2000) mengingatkan

bahwa proses komodifikasi budaya menjadi tantangan serius karena dapat mengancam keaslian dan makna sosial warisan budaya apabila tidak dikelola secara hati-hati. Hall dan McArthur (1998) menambahkan bahwa keberhasilan pariwisata budaya sangat bergantung pada kepemimpinan yang partisipatif, di mana masyarakat lokal berperan aktif dalam menjaga dan menafsirkan warisan mereka.

Dalam merespons tantangan tersebut, pemerintah Kamboja membentuk Authority for the Protection of the Site and Management of the Region of Angkor (APSARA) pada 1995 melalui Royal Decree. APSARA memiliki mandat untuk mengelola kawasan Angkor secara menyeluruh, termasuk konservasi arkeologi, manajemen pariwisata, regulasi pemanfaatan lahan, serta pengembangan sosial-ekonomi masyarakat sekitar (APSARA Authority, n.d.). Melalui kebijakan seperti zoning system, pengendalian pembangunan, serta program Community Development and Cultural Heritage Education, APSARA berupaya menjaga keseimbangan antara pelestarian nilai otentik warisan budaya dan pengembangan pariwisata (UNESCO, 2023).

Selanjutnya, APSARA menerapkan pendekatan *integrated heritage management* yang mencakup dimensi fisik dan non-fisik warisan, termasuk tradisi, kesenian, dan praktik spiritual masyarakat lokal. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pariwisata budaya yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam pelestarian dan interpretasi budaya mereka sendiri (Timothy, 2014). Dengan melibatkan komunitas lokal dalam kegiatan konservasi dan ekonomi kreatif berbasis warisan, APSARA tidak hanya menjaga situs bersejarah dari degradasi, tetapi juga memperkuat identitas budaya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam kerangka ini, kebijakan APSARA menunjukkan bahwa pelestarian warisan budaya dan pengembangan pariwisata tidak bersifat kontradiktif, melainkan dapat berjalan berdampingan melalui tata kelola partisipatif dan visi keberlanjutan budaya yang kuat (APSARA Authority, n.d.; UNESCO, 2023; Hall & McArthur, 1998).

Secara keseluruhan, literatur menunjukkan bahwa pengelolaan pariwisata budaya yang berkelanjutan harus mengintegrasikan konsep carrying capacity, partisipasi masyarakat, dan pelestarian nilai budaya. Dalam konteks Angkor, seluruh prinsip tersebut bertemu dalam peran APSARA Authority sebagai lembaga yang berupaya menyeimbangkan konservasi warisan, pengendalian dampak overtourism, dan pemberdayaan komunitas lokal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pengelolaan pariwisata budaya yang diterapkan oleh APSARA Authority, mengevaluasi efektivitas kebijakan tersebut dalam menghadapi tantangan overtourism, serta menilai sejauh mana kebijakan tersebut berkontribusi terhadap keberlanjutan pelestarian warisan budaya dan kesejahteraan masyarakat lokal di kawasan Angkor.

METODE

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur, sebagai dasar analisis untuk memahami kebijakan APSARA dalam pengelolaan pariwisata budaya di Angkor Wat. Tujuan digunakannya pendekatan ini dipilih karena data yang diperlukan tersedia dalam bentuk dokumen tertulis, sehingga penelitian ini dapat dilakukan tanpa observasi lapangan. Melalui studi literatur, berbagai sumber dokumen dikumpulkan dan ditelaah seperti dokumen kebijakan APSARA, pedoman UNESCO, laporan resmi, protokol pengelolaan wisata, dan publikasi akademik bukan pengamatan fisik di lapangan.

Strategi pemilihan dokumen penelitian dirancang secara sistematis dengan menggunakan purposive sampling, yaitu dokumen kebijakan APSARA dan UNESCO terkait pariwisata, konservasi, regulasi lingkungan, serta aspek sosial-ekonomi dan snowball mengikuti referensi dari dokumen awal untuk memperluas literatur. Pengelolaan data dilakukan melalui content analysis untuk menelaah regulasi, mandat, dan instrumen kebijakan, kemudian hasil temuan dikelompokkan ke dalam empat aspek kebijakan : ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Setelah kategorisasi, peneliti mengevaluasi efektivitas kebijakan APSARA dengan mempertanyakan sejauh mana instrumen kebijakan mampu meredam dampak over tourism pada tiap aspek. Pada tahapan akhir, hasil analisis tiap aspek disusun di rekomendasi kebijakan

berkelanjutan yang didasarkan pada teori pariwisata berkelanjutan dan praktik terbaik internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum

Pariwisata menjadi penggerak utama perekonomian Siem Reap berkat pertumbuhan jumlah wisatawan asing yang spektakuler sebelum masa pandemi. Data resmi menunjukkan bahwa wisatawan asing ke Siem Reap-Angkor mencapai sekitar 2,45 juta pada 2017 dan naik menjadi 2,59 juta pada 2019 (Apsara Authority, 2018; TTG Central Europe, 2019). Jumlah kunjungan yang meningkat menunjukkan bahwa Angkor Wat telah berkembang menjadi destinasi wisata utama di seluruh dunia. Akibatnya, industri pariwisata, hotel dan infrastruktur pendukung semuanya berkembang dengan cepat. Namun, di balik kesuksesan jumlah kunjungan, tersimpan konsekuensi serius yaitu jumlah pengunjung yang besar berpotensi mengurangi kapasitas fisik situs dan ekosistem di sekitarnya, peningkatan tekanan terhadap sumber daya alam seperti air dan lingkungan, dan pertumbuhan pariwisata berpotensi memperburuk ketimpangan ekonomi lokal karena keuntungan yang diperoleh oleh investor dan operator besar. Oleh karena itu tren peningkatan jumlah wisatawan yang terjadi sebelum pandemi menunjukkan kampanye pariwisata yang berhasil itu juga memberikan kesempatan untuk melihat bagaimana *overtourism* berdampak pada kesejahteraan lingkungan, situs warisan, dan masyarakat lokal Siem Reap.

Sebelum pandemi Covid-19, tempat wisata terkenal telah melihat peningkatan jumlah pengunjung. Namun, lonjakan ini memiliki dampak signifikan terhadap masyarakat lokal dan kelestarian situs warisan, meskipun ada juga keuntungan. Banyak literatur menyatakan bahwa *overtourism* menyebabkan kerusakan fisik situs seperti pengikisan batu dan kerusakan bangunan bersejarah (Arndt, 2024; Fylen et al., 2023; Leventi et al., 2025). Tekanan ini mempercepat kerusakan lingkungan sekitar melalui sampah, polusi, erosi permukaan dan jalan, serta tekanan terhadap ekosistem (Traveloka, 2024; ICOMOS cited in Leventi et al., 2025). Selain itu terlalu banyak wisatawan sering menyebabkan tekanan sosial - budaya dan ketimpangan ekonomi lokal. Warga lokal mungkin mengalami perubahan gaya hidup, komersialisasi budaya, marginalisasi tradisi aslin, atau pergeseran nilai budaya sebagai akibat dari dominasi wisata (Sutanto & Setiadi, 2020; Panorama, 2024). Pariwisata menyebabkan ketimpangan ekonomi menjadi lebih jelas karena keuntungan finansial yang dihasilkan dari industri ini biasanya terfokus pada investor besar atau pelaku industri, bukannya masyarakat lokal (Sutanto & Setiadi, 2020; Fieriskhertage, 2025). Oleh karena itu, meskipun pariwisata menghasilkan uang, efek negatifnya tidak dapat diabaikan: kerusakan warisan, degradasi lingkungan, dan tekanan terhadap ekonomi dan struktur sosial-budaya lokal (Sustainable Travel, 2024; Andt, 2024).

Analisis Kebijakan APSARA Authority dalam Pengelolaan Angkor Wat

Kebijakan pengelolaan pariwisata yang diberikan oleh APSARA Authority dalam memberikan perlindungan kepada warisan budaya Angkor Wat salah satunya adalah dengan mengimplementasikan kebijakan zonasi atau *zoning system*. Kebijakan ini kemudian diatur dalam *Zoning and Management Plan* resmi menurut dokumen kerajaan dan peta APSARA. Berdasarkan Kret No. 001/NS, APSARA membagi Angkor Wat ke dalam lima zona yang dimana Zona 1 merupakan *monumental sites*, Zona 2 merupakan *Protected Archaeological Reserves*, Zona 3 merupakan *Protected Cultural Landscapes*, Zona 4 merupakan *Sites of Archaeological, Anthropological, or Historic Interest*, serta Zona 5 merupakan Zona Pengembangan Sosial-Ekonomi dan Budaya Siem Reap atau Angkor Wat. Zona 1 memiliki tingkat proteksi yang paling tinggi di atas zona-zona lainnya karena mencakup situs arkeologis paling penting, sementara Zona 2 berfungsi sebagai penyangga untuk melindungi artefak yang kurang terlihat dari pembangunan yang tidak tepat (Kerajaan Kamboja, 1994 dalam FAOLEX). Zona 3 merupakan lanskap budaya yang dilindungi dan berada di sepanjang sungai, Zona 4 mencakup situs yang tidak termasuk dalam Zona 1 dan 2, serta Zona 5 merupakan zona terluas yang mencakup seluruh wilayah Provinsi. Kelima zona ini diatur agar menjaga integritas fisik dan lanskap budaya, membatasi jenis

pembangunan yang diizinkan di masing-masing zona dan mengatur penggunaan lahan agar sesuai dengan sensitivitas arkeologis dan ekologi (APSARA Authority, n.d.).

Kebijakan APSARA Authority lainnya dalam pengelolaan Angkor Wat yang dalam ini dikhususkan untuk pengendalian wisatawan dan infrastruktur adalah salah satunya *Tourism Management Plan* pada tahun 2012-2020 yang dirancang untuk menghadapi pertumbuhan pengunjung yang cepat sambil menjaga nilai warisan budaya Angkor Wat (UNESCO, n.d.). Strategi utamanya adalah pembuatan jalur khusus wisatawan, pembatasan waktu kunjungan, serta pembentukan standar operasional bagi operator pariwisata untuk meminimalkan dampak terhadap situs utama. Selain itu, APSARA bekerja sama dengan pemilik kepentingan lokal untuk mengkomunikasikan nilai-nilai budaya dan sosial Angkor Wat sebagai tempat tinggal yang hidup, bukan hanya situs turis, sehingga wisatawan lebih sadar dan menghormati kehadiran masyarakat lokal (UNESCO, n.d.). Program ini juga melibatkan komunitas melalui lokakarya dengan pemuka agama, warga, dan pemangku pariwisata untuk menyelaraskan praktik wisata dengan kebutuhan lokal dan konservasi warisan.

Laporan *State of Conservation* (SOC) pada tahun 2025 menunjukkan bahwa mekanisme ini diperkuat setelah misi *Reactive Monitoring* UNESCO pada Desember 2024 menunjukkan tekanan signifikan terhadap *carrying capacity* situs-situs tertentu seperti Bayon, terutama di ruang galeri sempit dan titik elevasi yang ramai dikunjungi (UNESCO, 2025). Temuan ini mendorong rencana pembaharuan *Tourism Management Plan* untuk meningkatkan strategi penyebaran wisatawan, termasuk diversifikasi jalur kunjungan dan promosi area alternatif agar konsentrasi pengunjung tidak hanya terpusat pada Angkor Wat dan Bayon (APSARA Authority, n.d.). Selain itu, UNESCO melaporkan pembangunan jalur pejalan kaki ramah lingkungan telah ada sejak tahun 2022 serta program *cash for work* yang melibatkan masyarakat lokal untuk mendukung pemeliharaan infrastruktur wisata, sehingga menekan dampak lingkungan sekaligus memberi manfaat ekonomi bagi komunitas (UNESCO, 2023).

Integrasi Pariwisata Budaya dalam Pengelolaan APSARA Authority

Integrasi pariwisata budaya dalam kebijakan APSARA menunjukkan bagaimana kegiatan wisata dapat dimanfaatkan sebagai instrumen pelestarian warisan budaya, dimana APSARA menyediakan berbagai media edukasi bagi wisatawan, mulai dari pusat informasi, papan interpretatif, dan program guided tour yang dijalankan oleh pemandu wisata. Selain itu APSARA juga melibatkan masyarakat lokal sebagai bagian dari pelestarian, masyarakat di sekitar Angkor Wat tidak hanya berperan sebagai penjaga praktik budaya, tetapi juga sebagai pemandu lokal, pengrajin, pelaku usaha ekonomi yang dimana hal ini selaras dengan prinsip *Community Based Tourism* (CBT) yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama pelestarian dan penerima manfaat pariwisata (Damanik, 2021). Keterlibatan komunitas dalam program *Community Development and Cultural Heritage Education* APSARA juga menciptakan ruang bagi masyarakat untuk mempertahankan kesenian tradisional secara berkelanjutan.

Meskipun pariwisata budaya membawa peluang, integrasinya dalam kawasan Angkor Wat juga memberikan tantangan berupa komodifikasi budaya, yang dimana komodifikasi akan menggeser makna budaya asli akan menjadi objek konsumsi wisatawan, sehingga hal ini dapat mengancam nilai simbolik dan spiritual masyarakat lokal (Graham et al., 2000). Selain itu, tekanan pasar pariwisata terhadap ritual lokal juga memperbesar risiko hilangnya keaslian budaya. Misalnya, beberapa komunitas di sekitar Angkor Wat yang menyesuaikan format upacara tradisional agar lebih mudah diterima wisatawan internasional, sehingga hal tersebut mengurangi nilai sakral dan konteks sosial (Hall & Page, 2014)

Dalam menghadapi risiko komodifikasi APSARA mengembangkan sejumlah strategi pelestarian yang berorientasi pada keberlanjutan budaya, melalui *Community Development and Cultural Heritage Education*. APSARA memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang konservasi budaya, manajemen wisata, sampai revitalisasi kerajinan tradisional yang dimana strategi ini sejalan dengan pendekatan *integrated heritage management* yaitu pengelolaan warisan yang tidak hanya mencakup aspek fisik situs tetapi juga budaya seperti pertunjukan, praktik spiritual, dan tradisi lokal (UNESCO, 2023). Pendekatan ini dinilai lebih efektif karena

mendorong komunitas lokal menjadi agen utama pelestarian budaya, bukan sekedar objek kebijakan. Selain itu APSARA juga membangun kolaborasi dengan seniman, lembaga budaya, dan mitra internasional seperti UNESCO dan JASA (Japan-APSARA Safeguarding Angkor) sebuah inisiatif gabungan antara pemerintah Jepang dan Kamboja untuk merestorasi salah satu kuil di Angkor Wat.

Upaya penjagaan autentitas budaya juga dilakukan melalui sistem zonasi dan regulasi aktivitas budaya. APSARA menetapkan ruang-ruang tertentu dimana kegiatan budaya sakral tidak boleh di tontonkan sebagai wisata sehingga hal tersebut dapat melindungi area ritual dan komersial, pendekatan ini sejalan dengan rekomendasi UNESCO untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan wisata dan perlindungan nilai-nilai spiritual warisan dunia (UNESCO, 2023).

Evaluasi Efektivitas Kebijakan APSARA Authority

Sejak didirikan pada tahun 1995, APSARA Authority telah beroperasi di persimpangan yang rumit antara mandat konservasi internasional yang ketat di bawah Konvensi Warisan Dunia UNESCO dan tekanan pembangunan ekonomi nasional Kamboja yang mendesak pasca-konflik. Dalam konteks pengelolaan *living heritage*, efektivitas tidak dapat diukur sukses atau gagalnya. Ia harus dipahami sebagai spektrum kinerja di mana keberhasilan konservasi arkeologis seringkali harus dibayar dengan biaya sosial yang tinggi, atau di mana keberhasilan pariwisata ekonomi menciptakan risiko degradasi lingkungan jangka panjang.

APSARA Authority telah mencatatkan pencapaian monumental dalam mengubah Angkor dari situs yang terancam bahaya (*World Heritage in Danger*) menjadi model global untuk manajemen arkeologi. Melalui implementasi *Zoning and Environmental Management Plan* (ZEMP) yang ditegakkan melalui Dekrit Kerajaan tahun 1994, otoritas berhasil menetapkan batas-batas legal yang jelas antara *Monumental Sites* (Zona 1), *Protected Archaeological Reserves* (Zona 2), *Protected Cultural Landscapes* (Zona 3), *Sites of Archaeological, Anthropological or Historic Interest* (Zona 4), dan *The Socio-Economic and Cultural Development Zone of Siem Reap Region* (Zona 5). Tujuan utama dari pembentukan zonasi ini untuk memperjelas batas kawasan yang dilindungi dan mencegah urbanisasi di situs-situs monumen (Miura, 2011, p. 17). Hal ini menandai keberhasilan APSARA dan menghentikan anarki spasial yang mengancam situs pada awal 1990-an.

Salah satu indikator keberhasilan paling strategis adalah pembentukan dan operasionalisasi *Stone Conservation Unit* (SCU) di bawah APSARA. Melalui kemitraan jangka panjang dengan badan kerjasama Jerman (GIZ) sejak 2007, APSARA telah melakukan transformasi radikal dalam transfer pengetahuan (*Stone Conservation*, 2021). Program pelatihan vokasi dua tahun yang diluncurkan pada 2013 telah melahirkan generasi baru konservator Kamboja yang memiliki kompetensi standar internasional. Kini, teknisi lokal mampu melakukan intervensi konservasi yang kompleks secara mandiri, mengurangi ketergantungan pada konsultan asing untuk pemeliharaan rutin.

Mekanisme *International Coordinating Committee* (ICC-Angkor) yang dipimpin bersama oleh Jepang dan Prancis telah diakui secara global sebagai model diplomasi budaya yang paling efektif (Ichitomo, 2024). Berbeda dengan model bantuan donor tradisional yang seringkali terfragmentasi, ICC-Angkor memaksa koordinasi teknis yang ketat, seperti proyek *Japan-APSARA Safeguarding Angkor* (JASA). Proyek ini tidak hanya merestorasi perpustakaan utara Angkor Wat dan menara Suor Prat, tetapi menempatkan arkeolog Kamboja sebagai pemimpin lapangan berdampingan dengan ahli dari Universitas Waseda (UNESCO Celebrates 30 Years of the "Safeguarding the Bayon Temple of Angkor Thom" Project, 2024). Kerjasama ini telah memperkuat kapasitas institusional APSARA secara signifikan, memungkinkan mereka beralih dari sekedar penjaga situs menjadi lembaga riset dan konservasi yang kredibel.

Melalui *Angkor Management Plan* (AMP) dan kerjasama dengan UNESCO, APSARA telah berupaya mengintegrasikan *intangible heritage* dan ekonomi kreatif masyarakat lokal ke dalam ekosistem pariwisata. Desa Preah Dak di distrik Banteay Srei dapat kita gunakan sebagai contoh nyata keberhasilan integrasi *community based tourism*. Desa ini telah bertransformasi menjadi desa wisata model yang mempertahankan struktur demografi aslinya sambil mendapatkan

manfaat ekonomi langsung (Rohany, 2024). Dukungan terhadap kerajinan lokal, seperti anyaman keranjang dan gula aren, serta kuliner tradisional telah menciptakan rantai nilai ekonomi yang tetap berada di desa. Hal ini menjadi contoh nyata bahwa dengan pendampingan yang tepat, komunitas lokal dapat menjadi aset pariwisata, bukan beban konservasi.

Tantangan utama bagi efektivitas kebijakan APSARA adalah peran ganda pariwisata sebagai tulang punggung ekonomi nasional sekaligus ancaman utama bagi situs Angkor. Pada 2024, pariwisata menyumbang 17,8% dari PDB Kamboja dengan pendapatan US\$3,63 miliar (Rinith, 2025). Tekanan makroekonomi ini memaksa APSARA untuk mengakomodasi target kunjungan yang agresif, seringkali mengorbankan prinsip daya dukung. Lonjakan wisatawan pasca-pandemi menjadi salah satu penyumbang dalam *overtourism*. Pada paruh pertama 2025, kunjungan wisatawan asing melonjak hampir 570.000 orang (*Cambodia Records Surging Tourist Numbers at Angkor in Early 2025, Generating Over Twenty Six Million Dollars in Revenue*, 2025). Angka ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dibanding tahun sebelumnya, dengan pendapatan tiket mencapai lebih dari US\$26 juta. Meskipun ini merupakan kabar baik bagi ekonomi, pola kunjungan ini menunjukkan gejala *overtourism* yang terkonsentrasi.

Struktur pendanaan konservasi Angkor juga menyimpan kelemahan tata kelola. Selama bertahun-tahun, pengelolaan tiket diserahkan kepada perusahaan swasta, seperti Sokimex, yang memicu tuduhan korupsi dan minimnya transparansi mengenai berapa persen pendapatan yang benar-benar kembali ke situs (*Ticket Revenue at Angkor Complex up 8 Percent*, 2019). Meskipun sejak 2016 *Angkor Enterprise*, sebagai badan usaha milik negara, telah mengambil alih pengelolaan ini, isu alokasi dana masih tetap relevan. Pendapatan tiket yang mencapai puluhan juta dolar setiap tahun sebagian besar masuk ke perbendaharaan nasional, sementara proyek-proyek konservasi vital masih sangat bergantung pada bantuan asing. Ketergantungan dana dari Jepang, Prancis, India, dan China menciptakan risiko keberlanjutan jangka panjang. Jika prioritas donor berubah, APSARA mungkin tidak memiliki kapasitas finansial mandiri untuk memelihara situs seluas 400km² tersebut. Selain itu, ketergantungan ini menciptakan fragmentasi teknis, di mana metode konservasi yang berbeda-beda diterapkan oleh berbagai tim internasional. Hal ini nantinya dapat mempersulit standarisasi manajemen situs. Cara Sitasi.

KESIMPULAN

APSARA Authority, dibentuk khusus setelah Angkor ditetapkan sebagai Situs Warisan Dunia oleh UNESCO, memegang peran vital dalam konservasi monumen, pengelolaan lingkungan, serta perencanaan pariwisata dan pembangunan berkelanjutan di kawasan Angkor. Mandatnya meliputi pelestarian fisik struktur monumen, pengelolaan sistem air kuno, dan perlindungan lingkungan di sekitar situs, sekaligus menyeimbangkan antara kebutuhan pelestarian dan perkembangan pariwisata. APSARA menerapkan kerangka manajemen yang mencakup pengaturan jalur kunjungan, rencana wisata berkelanjutan, pengelolaan kapasitas kunjungan, dan fasilitas pendukung untuk mengendalikan dampak kunjungan wisata yang besar yang dapat merusak monumen dan lingkungan sekitar. Selain aspek teknis konservasi, APSARA juga memperkuat keterlibatan komunitas lokal dan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah Kamboja, UNESCO, serta lembaga konservasi internasional. Pendekatan kolaboratif ini tidak hanya fokus pada pemeliharaan fisik, tetapi juga pelestarian nilai-nilai spiritual, sosial, dan lingkungan yang melekat pada situs Angkor. Melalui manajemen terpadu antara konservasi budaya dan pengelolaan pariwisata berkelanjutan, APSARA berhasil mengubah tekanan dari pariwisata menjadi peluang untuk perlindungan jangka panjang.

Dengan strategi pengelolaan yang komprehensif ini, APSARA menjaga agar Angkor tetap menjadi destinasi wisata yang menarik sekaligus situs warisan dunia yang dihormati dan diwariskan secara berkelanjutan. Pendekatan ini meliputi mitigasi risiko kerusakan fisik, degradasi lingkungan, dan kehilangan nilai budaya, serta penguatan kapasitas lokal dalam pelestarian. Transformasi ini menjadikan Angkor bukan hanya sebagai simbol kebanggaan Kamboja, melainkan juga model pengelolaan warisan budaya yang bisa diterapkan di berbagai konteks dunia. Dengan kata lain, APSARA sebagai otoritas resmi tidak hanya menjaga dan mengelola situs Angkor secara fisik, tetapi juga secara holistik mengarahkan pengembangan

kawasan ini dengan prinsip-prinsip berkelanjutan dan partisipatif, sehingga keterlibatan multi-pihak dan pendekatan ilmiah menjadi kunci keberhasilan pelestarian dan pengelolaan pariwisata di Angkor.

DAFTAR PUSTAKA

- 28 Million Tourists Visit Angkor Wat Archeological Park Since 2000. Myanmar Inquirer. (2025, February 17). <https://myanmarinquirer.com/28-million-tourists-visit-angkor-wat-archeological-park-since-2000/>
- André, M.-F., Phalip, B., Voldoire, O., Vautier, F., Géraud, Y., Benbakkar, M., Constantin, C., Huber, F., & Morvan, G. (2011). Weathering of sandstone lotus petals at the Angkor site: a 1,000-year stone durability trial. *Environmental Earth Sciences*, 63(7–8), 1723–1739. <https://doi.org/10.1007/s12665-010-0734-9>
- APSARA Authority. (n.d.). About APSARA National Authority. <https://apsaraauthority.gov.k>
- APSARA Authority. (2024). Tourism Management Plan (TMP) Final 2024. APSARA National Authority.
- Butler, R. W. (1999). Sustainable tourism: A state-of-the-art review. *Tourism geographies*, 1(1), 7–25.
- Cambodia Records Surging Tourist Numbers at Angkor in Early 2025, Generating Over Twenty Six Million Dollars in Revenue. (2025, July 3). Travel and Tour World. <https://www.travelandtourworld.com/news/article/cambodia-records-surging-tourist-numbers-at-angkor-in-early-2025-generating-over-twenty-six-million-dollars-in-revenue/>
- Damanik, J. (Ed.). (2021). *Pariwisata Indonesia kontemporer*. Yogyakarta: UGM Press.
- FAOLEX. (1994). Royal Decree on the Establishment of Protected Zones in the Region of Angkor (Kret No. 001/NS). Food and Agriculture Organization. <https://faolex.fao.org/docs/pdf/cam49030.pdf>
- Gillespie, J. (2009). Protecting World Heritage: Regulating Ownership and Land Use at Angkor Archaeological Park, Cambodia. *International Journal of Heritage Studies*, 15(4), 338–354. <https://doi.org/10.1080/13527250902933900>
- Graham, B., Ashworth, G. J., & Tunbridge, J. E. (2000). *A geography of heritage: Power, culture and economy*. Arnold.
- Hall, C. M., & McArthur, S. (1998). *Heritage management in Australia and New Zealand: The human dimension*. Oxford University Press.
- Hall, C. M., & Page, S. J. (2014). *The geography of tourism and recreation: Environment, place and space*. Routledge.
- Hor, C. (2021). Assessing the dynamic tourism inter-industry linkages and economic structural changes in Cambodia's economy. *Journal of Economic Structures*, 10(1), 18. <https://doi.org/10.1186/s40008-021-00249-1>
- Ichitomo, T. (2024). International Coordinating Committee for Angkor (ICC-Angkor): Reflections from Diplomatic Perspectives. *AVI REVIEW OF INTERNATIONAL COOPERATION STUDIES*.
- Kiernan, B. (2002). Introduction: Conflict in Cambodia, 1945-2002. *Critical Asian Studies*, 34(4), 483–495. <https://doi.org/10.1080/1467271022000035893>
- Mao, N., Delacy, T., & Grunfeld, H. (2013). Local Livelihoods and the Tourism Value Chain: A Case Study in Siem Reap-Angkor Region, Cambodia. *International Journal of Environmental and Rural Development*, 4(2), 120–126. https://doi.org/https://doi.org/10.32115/ijerd.4.2_120
- Miura, K. (2011). World Heritage Making in Angkor. Global, Regional, National and Local Actors, Interplays and Implications. In *World Heritage Angkor and Beyond: Circumstances and Implications of UNESCO Listings in Cambodia*. Universitätsverlag Gottingen.

- Rinith, T. (2025, March 27). Cambodia's tourism sector lags behind several fellow ASEAN members. Khmer Times. <https://www.khmertimeskh.com/501660461/cambodias-tourism-sector-lags-behind-several-fellow-asean-members/>
- Rohany, I. (2024, June 24). Preah Dak Bids for Best Tourism Village. CamNess. <https://cambodianess.com/article/preah-dak-bids-for-best-tourism-village>
- Rudy, D. G., & Mayasari, I. D. A. D. (2019). Prinsip-Prinsip Kepariwisata dan Hak Prioritas Masyarakat dalam Pengelolaan Pariwisata berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata. Kertha Wicaksana, 13(2), 73-84.
- Stone Conservation. (2021, April 20). Giz Cambodia. <https://giz-cambodia.com/stone-conservation-2/>
- Ticket revenue at Angkor complex up 8 percent. (2019, January 2). Khmer Times. <https://www.khmertimeskh.com/564897/ticket-revenue-at-angkor-complex-up-8-percent/>
- Timothy, D. J. (2014). Contemporary cultural heritage and tourism: Development issues and emerging trends. Public Archaeology, 13(1-3), 30-47.
- Uchida, E., Ogawa, Y., Maeda, N., & Nakagawa, T. (2000). Deterioration of stone materials in the Angkor monuments, Cambodia. Engineering Geology, 55(1-2), 101-112. [https://doi.org/10.1016/S0013-7952\(99\)00110-6](https://doi.org/10.1016/S0013-7952(99)00110-6)
- UNESCO & APSARA Authority. (2022). Map of Angkor Protected Zones — UNESCO Report. APSARA National Authority. <https://apsaraauthority.gov.kh/wp-content/uploads/2022/06/Map-of-Angkor-Protected-Zone-Report-Kh-Unesco.pdf>
- UNESCO. (n.d.). Angkor and the Tourism Development Strategic Plan (TDSP) & Tourism Management Plan (TMP). UNESCO Sustainable Tourism Toolkit. <https://whc.unesco.org/en/sustainabletourismtoolkit/guide2/angkor/>
- UNESCO. (2023). Angkor. UNESCO World Heritage Centre. <https://whc.unesco.org/en/list/668/>
- UNESCO celebrates 30 years of the “Safeguarding the Bayon Temple of Angkor Thom” Project. (2024, December 13). UNESCO. <https://www.unesco.org/en/articles/unesco-celebrates-30-years-safeguarding-bayon-temple-angkor-thom-project>
- UNESCO. (2023). Improving visitor infrastructure in Angkor, Cambodia. UNESCO World Heritage Centre. <https://whc.unesco.org/en/sustainable-tourism-covid-Cambodia/>
- UNESCO. (2025). State of Conservation (SOC) 2025: Angkor (Cambodia). UNESCO World Heritage Centre. <https://whc.unesco.org/en/soc/4757>
- Vanyuth, C. (2024). Angkor Wat sees 28% rise in visits, nets \$42 million. Khmer Times. <https://www.khmertimeskh.com/501601877/angkor-wat-sees-28-rise-in-visits-nets-42-million/>